



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR



RENCANA KERJA TAHUN 2022



Kata Pengantar



Segala Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat

Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Dokumen Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disusun untuk menjawab serta menyesuaikan dengan

perkembangan masalah serta isu-isu strategis bidang lingkungan hidup yang semakin kompleks dan dinamis seiring dengan perkembangan pembangunan, terutama terkait dengan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sesuai Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Renja ini merupakan hasil diskusi, masukan dan analisis perencanaan pembangunan lingkungan hidup yang telah disepakati oleh berbagai pihak sesuai arah kebijakan, strategi, dan tujuan DLH Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang lingkungan hidup. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Pada akhirnya, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan lingkungan hidup yang lebih baik di Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Akademisi serta LSM, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini.

Surabaya, April 2021

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR



SINARTO, S.Kar, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630614 199103 1 007

Daftar Isi

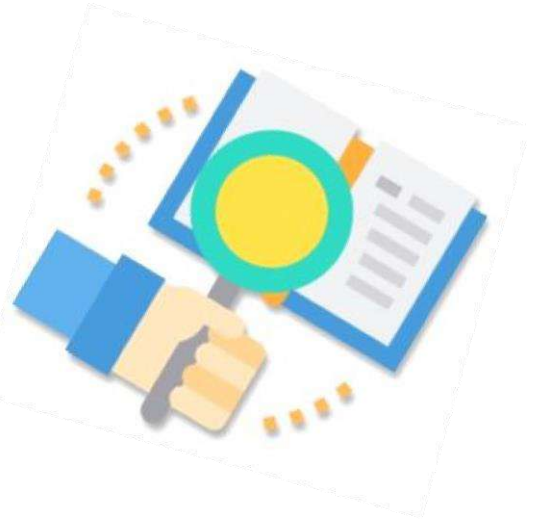
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum.....	3
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	7
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra DLH Provinsi Jawa Timur	7
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	17
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	19
II.4. Review terhadap RKPD.....	22
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	45
III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	45
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja	45
III.3. Program dan Kegiatan	47
BAB V PENUTUP	60
V.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	60
V.2. Rencana Tindak Lanjut.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019	10
Tabel II. 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
Tabel II. 3.	Nilai IKLH, IKA, IKU dsn IKTL Tahun 2015-2019	20
Tabel II. 5.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	23
Tabel II. 6.	Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/ Kota Tahun 2021	41
Tabel III. 1.	Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tahun 2020	45
Tabel III. 2.	Prioritas, dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2020.....	45
Tabel III. 3.	Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	46
Tabel III. 4.	Program dan Kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.....	48
Tabel IV. 1.	Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	56
Tabel IV. 2.	Program dan Kegiatan Prioritas DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	59

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Awal Renja Perangkat daerah (PD) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

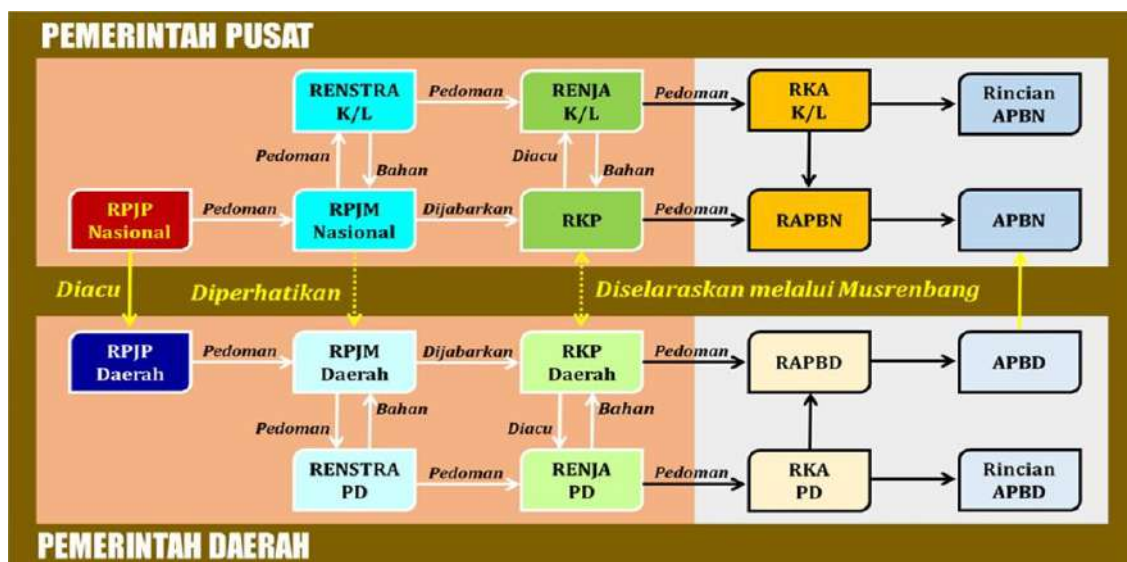
- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas,

sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dapat menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan kerangka pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja tahun 2021 disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024. Rancangan Awal Renja yang disusun juga menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan untuk disinergikan dalam proses penyusunan RKPD.

Substansi dalam Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan hasil penyelarasan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. Di samping itu, Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 juga merupakan transisi dari kebijakan, indikator kinerja, kelompok sasaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perubahan RPJMD 2019-2024. Secara singkat, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lain ditunjukkan pada Gambar I.1.



Gambar I. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau disingkat menjadi DLH Provinsi Jawa Timur, yang berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

memiliki fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan di Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup. Oleh karenanya, DLH Provinsi Jawa Timur perlu merumuskan dan menyusun Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang berbasis pada perlindungan serta pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

I.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renja DLH Provinsi Jawa Timur tahun 2012, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

I.3. Maksud dan Tujuan

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 127 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa maksud perumusan dan penyusunan Renja adalah sebagai pelaksanaan agenda kerja Tim Perencanaan DLH Provinsi Jawa Timur, agar terwujud keterpaduan dan sinergitas dengan program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan prakiraan maju antara Renstra PD dan Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan eksisting, kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan sasaran Renstra PD. Dengan kata lain, Renja merupakan dokumen yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah, penyusunan RKA, serta monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. Di samping itu, penyusunan Renja ini juga untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi antara Renja Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota.

I.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang pengertian singkat Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan urgensi terhadap penyusunannya yang terdiri dari:
 - I.1. Latar Belakang;
 - I.2. Landasan Hukum;
 - I.3. Maksud dan Tujuan; dan
 - I.4. Sistematika Penulisan.
2. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, dan capaian prioritas dan target program Renstra DLH Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2020, serta isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur, dan kebijakan bidang lingkungan hidup dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Jawa Timur yang terdiri dari:
 - II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;

- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD;
 - II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
 - II.4. Review terhadap RKPD; dan
 - II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan prakiraan maju yang didasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja dalam dokumen Renstra DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Bab III Renja terdiri dari:
- III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional;
 - III.2. Tujuan dan Sasaran Renja; dan
 - III.3. Program dan Kegiatan.
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat tentang rencana kerja perangkat daerah yang dijabarkan dalam program, kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan kebutuhan dana, serta target capaian kinerja program dan kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur.
5. BAB IV PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra DLH Provinsi Jawa Timur

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian Rancangan Renstra Tahun 2014-2019 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DLH Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DLH

Provinsi Jawa Timur, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur, dan perkiraan pelaksanaan DPA-DLH Provinsi Jawa Timur tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja DLH Provinsi Jawa Timur tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra DLH Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan yang telah dipilih dan ditentukan kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari suatu kebijakan. Program pembangunan memuat tindakan aksi atau kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap. Program DLH Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan

Program ini merupakan program pendukung pembangunan. Program ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi administrasi umum, keuangan dan penyusunan program dan anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Jawa Timur dalam program ini adalah kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah; *Ketatausahaan dan Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Keuangan*.

Realisasi anggaran program ini adalah sebesar Rp 17,272,256,100.00 atau sebesar 94.75 % dari Rp. 18,228,876,800.00



2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup merupakan program pembangunan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Jawa Timur dititikberatkan pada:

- a) *Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup;*
- b) *Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup;*
- c) *Kegiatan Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.*

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 1,368,775,365.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,342,749,997.00 atau 98.10 %.

3. Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam

Program ini juga bertujuan melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Jawa Timur dalam program pembangunan ini dititikberatkan pada kegiatan *Inventarisasi dan Penerapan Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penerapan Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam* Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 5,840,246,774.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,402,053,719.00 atau 92.50 %.

4. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah dan limbah B3 di Jawa Timur. Kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Jawa Timur dalam program pembangunan ini dititikberatkan pada kegiatan *Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengolahan dan Pemrosesan Sampah; Kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dan Kegiatan Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3.*

Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan anggaran sebesar Rp. 1,367,595,900.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,344,499,452.00 atau 98.31 %.

5. Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Program pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan hukum para pelaku usaha. Kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Jawa Timur dititikberatkan pada: *Kegiatan Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pelestarian dan Perlindungan Sumber Daya Alam; Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Penaatan Hukum Lingkungan; dan Kegiatan Pelaksanaan Upaya dan Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup.*

Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 615,188,070.00 dan terealisasi sebesar Rp. 608,191,519.00 atau 98.86 %.

6. Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan

Program ini merupakan program pendukung pembangunan bidang lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Laboratorium DLH Provinsi Jawa Timur dititikberatkan pada: *Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, serta Penguatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan, dan Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan Pelanggan; Penguatan Kapasitas, Kompetensi dan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan, serta Jaringan Pemantauan dan Penyajian Data Kualitas Lingkungan; Kegiatan Pembangunan dan/atau Penguatan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur;*

Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 1,918,432,611.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,870,627,294.00 atau 97.51 %.

Namun, seiring meningkatnya dinamika politik, ekonomi, dan budaya yang sangat tinggi membuat DLH Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa perubahan terhadap beberapa program dan kegiatan termasuk indikator kinerja program/ kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Renja Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel II.1.

Tabel II. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Wajib										
1.11	Lingkungan Hidup										
1.11.01	Program Pelayanan Kesetreatriatan	1	Persentase indikator program yang tercapai (%)	79	89,87	75	75	100	90	90	100
		2	Persentase realisasi anggaran (%)	89	94,36	85	94,66	111			
		3	Indeks profesionalitas ASN	80	-	72	72	100	85	85	100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Indeks kepuasan masyarakat/aparaturnya terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	-	78	90	90	100	-	-	-
1.11.01001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Perangkat Daerah dan Pelaporan	1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	65	68	8	8	100	13	13	100
1.11.01002	Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	1	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	105	120	18	18	100	19	19	100
1.11.01003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	1	jumlah Dokumen Ketatausahaan dan kepegawaian	40	-	5	5	100	8	8	100
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur											
		1	Terpublikasikannya data hasil	60	60	12	12	100	12	12	100

1.11.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		pemataan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali (kali)								
		2	Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udara (kabupaten/kota)	35	9	1	1	100	5	5	100
		3	Luas lahan kritis yang dikonservasi/ rehabilitasi (Ha)	154	154	4	0	0	100	10	10
1.11.16.001	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Jumlah titik pantau kualitas air	162	219	27	85	315	27	27	100
		2	Jumlah titik pantau kualitas udara	38	418	4	16	400	15	15	100
1.11.16002	Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	1	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan (unit)	170	2	1	2	200	8	8	100
1.11.16003	Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Luasan Lahan Kritis yang direhabilitasi/ Konservasi yang menjadi kewenangan (Ha)	1500	0	4	0,1	3	10	10	100
1.11.33	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	1	Jumlah Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan	250	370	50	92	184	70	70	100

		2	Persentase Dokumen Perencanaan Kabupaten/ Kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100	0	20	50	250	65	65	100
		4	Jumlah Kab/kota yang Melaksanakan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	38	0	20	16	80	15	15	100
1.11.33002	Penerapan Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	1	Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen KLHS	38	370	10	11	110	18	18	100
1.11.33003	Kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1	Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan hidup dan/atau pelestarian SDA (unit)	400	-	100	100	100	200	0	0
1.11.34	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	Persentase Limbah B3 yang dikelola (%)	100	45	62,94	63	100	96	96	100
		2	Persentase Sampah yang dikelola (%)	100	35	96	97	101	63	63	100

1.11.34001	Kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengolahan dan Pemrosesan Sampah	1	Persentase peningkatan sarana TPST dan TPS 3R	100	0	97	100	103	97	97	100
1.11.34002	Kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengelolaan Limbah B3	1	Persentase penerbitan rekomendasi teknis izin pengelolaan limbah B3 skala provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100
1.11.34003	Kegiatan Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (unit)	152	0	53	53	100	27	27	100
1.11.35	Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawas	1395	1.465	250	724	289,60	210	210	100
		2	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup (Adiwiyata;kalpataru)	100	1.335	115	115	100	105	105	100
		3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	91	100	109,89	126	126	100
1.11.35001	Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dan Upaya Pengelolaan	1	Jumlah usaha/ Kegiatan yang diawasi secara langsung dan tidak langsung	950	1.465	250	724	290	210	210	100

	dan Pemantauan Lingkungan Hidup										
1.11.35002	Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Penataan Hukum Lingkungan		Presentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95	100	91	100	110	90	90	100
1.11.35003	Kegiatan Pelaksanaan Upaya dan Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup	1	jumlah institusi dan non istitusi yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	220	422	190	352	185	190	190	100
1.11.36	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	1	PAD atau Retribusi Daerah	2.5 M	9	0,90	1,36	151	1.8	1.8	100
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat/Pelanggan (IKM) terhadap pelayanan uji kualitas lingkungan hidup	81	76	75	77,47	103	78	78	100
1.11.36001	Pelaksanaan administrasi perkantoran serta penguatan sarana dan prasarana aparatur	1	Jumlah dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, serta Penguatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8	4	5	5	100	8	8	100

1.11.36002	Kegiatan Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan, dan Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan Pelanggan Jumlah	1	Jumlah sampel uji kualitas lingkungan	21.600	17.575	2.500	3.800	152	3.600	3.600	100
1.11.36003	Kegiatan Penguatan Kapasitas, Kompetensi dan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan, serta Jaringan Pemantauan dan Penyajian Data Kualitas Lingkungan	1	Persentase pemenuhan akreditasi laboratorium sesuai ISO 17025	100	100	100	100	100	100	100	100

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Indikator kinerja utama dalam implementasi suatu kebijakan menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan. Di samping itu, adanya indikator kinerja utama memungkinkan untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala pada saat diimplementasikan, sehingga ketika terdapat *output* dan *outcome* yang diukur tidak tercapai sesuai keinginan, maka dapat dilakukan analisis untuk merumuskan kembali hal-hal yang belum terdeteksi sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji dalam rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang akan dicapai. Dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Selain itu, penetapan indikator kinerja utama juga merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Dengan kata lain, upaya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Realisasi kinerja DLH Provinsi Jawa Timur secara singkat dapat direfleksikan melalui penyajian data rekapitulasi kinerja bidang lingkungan hidup pada Tabel II.2. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan, tidak semuanya terealisasi sesuai target. Masing-masing dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya.

Tabel II. 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	52,97 - 53,94	53,95 - 54,92	48,50 - 48,55	48,56 - 48,60	56,13	56,13	-	-	56,00	-	-
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	83,51 - 83,70	83,71 - 83,90	83,32 - 83,37	83,38 - 83,43	83,32	84,59	-	-	83,00	-	-
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	-	63,57 - 63,60	63,61 - 63,64	46,00 - 46,05	46,00 - 46,05	63,16	62,06	-	-	61,00	-	-

Pada Tabel II.2 di atas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang mempunyai beberapa pengaruh (*multiple effects*) terhadap realisasi kinerja indikator yang lain, yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Semakin banyak lahan kritis yang terehabilitasi, dan semakin banyak sumber mata air yang terkonservasi, maka semakin tinggi kualitas tutupan lahan. Semakin tinggi kualitas tutupan lahan, maka semakin luas *catchment area* (daerah tangkapan) air, penyerap air, dan penyangga tanah, serta semakin tinggi debit air yang mengalir ke sungai dan sebaliknya. Di samping itu, semakin tinggi kualitas tutupan lahan, maka semakin tinggi kadar pencemar udara yang terserap. Namun, realisasi kinerja IKTL juga sangat dipengaruhi oleh banyak permasalahan, salah satu yang kasat mata adalah alih fungsi lahan.

Permasalahan alih fungsi lahan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Namun, di sisi lain, alih fungsi lahan sangat erat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, di antaranya alih fungsi lahan untuk kawasan pemukiman. Dengan berlatar belakang pada pemenuhan kebutuhan manusia ini lah yang mengakibatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi sulit untuk dilakukan. Lebih lanjut, isu-isu penting yang berkaitan dengan kinerja pelayanan, tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur akan dibahas dalam Sub Bab II.3 berikut.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kondisi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur, maka isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu kejadian bencana alam dan penurunan status kesehatan masyarakat.

Dari isu penting ini dapat dirumuskan menjadi permasalahan lingkungan hidup agar mendapat perhatian dan penyelesaian berdasarkan tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur, antara lain:

- a. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2019 sebesar 63,16 mengalami penurunan sebesar 0,48 dibandingkan dengan IKTL tahun 2018 (63,56).
- b. Berdasarkan data Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019, dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 sebesar 52,69 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 56,13.

- c. Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebesar 83,50 sedangkan pada Tahun 2019 adalah sebesar 83,32. Kondisi menunjukkan bahwa kualitas udara pada tahun 2019 mengalami penurunan kualitas sebesar 0,40.
- d. IKLH merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Penetapan IKLH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan hidup di Jawa Timur sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari nilai-nilai indeks yang ada, hasil Perhitungan IKLH yang meliputi IKA dengan bobot 30%, IKU dengan bobot 30%, dan ITL dengan bobot 40% adalah sebesar 66,33 sehingga Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2019 sebesar 67,10, masuk dalam kategori cukup baik. Dengan klasifikasi atau kategori IKLH, antara lain:

No	Kisaran Nilai IKLH		Predikat
1)	$IKLH > 80$:	Sangat baik
2)	$70 < IKLH \leq 90$:	Baik
3)	$60 < IKLH \leq 70$:	Cukup Baik
4)	$50 < IKLH \leq 60$:	Kurang Baik
5)	$40 < IKLH \leq 50$:	Sangat Kurang Baik
6)	$30 < IKLH \leq 40$:	Waspada

Lebih detail capaian IKA, IKU, dan ITL Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 tercantum pada Tabel II.3 sebagai berikut.

Tabel II. 3. Nilai IKLH, IKA, IKU dsn IKTL Tahun 2015-2020

Indikator	Nilai Indeks Tahun					2020
	2015	2016	2017	2018	2019	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,69	66,81	66,29	66,36	67,10	67,04
Indeks Kualitas Air (IKA)	52,51	50,75	52,77	52,69	56,13	56,13
Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,09	90,09	85,49	83,50	83,32	84,59
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	64,01	61,40	62,02	63,56	63,16	62,06

e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan

Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 terdiri dari 223 unit TPST 3R, 3.981 unit Bank Sampah, dan 49 unit TPA, sedangkan sarana dan prasarana persampahan berupa TPST Regional, dan TPA Regional belum tersedia. Dari jumlah sarana dan prasarana persampahan yang tersedia tersebut, perlu adanya peningkatan baik jumlah maupun kapasitasnya agar potensi timbulan sampah dapat dikurangi dan ditangani.

Pasalnya, jumlah timbulan sampah pada tahun 2019 masih mencapai 17.498,17 ton/hari dengan jumlah penduduk sebesar 39.292.972 jiwa. Hal ini membawa indikasi bahwa dengan jumlah sarana dan prasarana persampahan yang tersedia belum memadai untuk menanggulangi masalah persampahan.

f. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3

Berdasarkan hasil inventarisasi dan analisis, jumlah limbah B3 yang terakomodir di tahun 2019 mencapai 170.000.000 ton/tahun. Jumlah limbah B3 ini belum termasuk limbah B3 yang berasal dari PLTU, sedangkan Provinsi Jawa Timur belum memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3. Selama ini para pelaku usaha dan/atau kegiatan merasa terbebani terutama dalam tingginya beban operasional dalam pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan, karena para pelaku usaha dan/atau kegiatan harus mengirimnya ke Pusat Pengelolaan Limbah (PPLi) B3 yang berada di Kab. Bogor.

Oleh karenanya, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 di Provinsi Jawa Timur menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha dan/atau kegiatan di Indonesia bagian timur, khususnya bagi para pelaku usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Jawa Timur.

g. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kelestarian lingkungan

Data pengaduan tentang pencemaran lingkungan yang diterima oleh DLH Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 sebanyak 14 kasus pengaduan atau bertambah 2 kasus pengaduan dibanding dengan tahun 2018 sebesar 49 kasus pengaduan.

Pada tahun 2019 ini pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan media yang tercemar terbagi menjadi pengaduan terhadap pencemaran media air sebanyak 41%, media udara sebanyak 15%, dan media tanah sebanyak 44% .

II.4. Review terhadap RKPD

Renja dan RKPD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan yang saling terkait. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Bab I dokumen Renja ini, bahwa substansi RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Renja, sedangkan substansi Renja sendiri merupakan bahan masukan dalam penyusunan RKPD. Oleh karena itu, review terhadap RKPD menjadi proses yang penting dalam penyusunan Renja agar substansi dalam RKPD dan Renja menjadi harmonis dan sinergi.

Tabel II. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase indikator program yang tercapai	92	39.033.600.325	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase indikator program yang tercapai	92	39.033.600.325
			Persentase realisasi anggaran	87				Persentase realisasi anggaran	87	
			Indeks profesionalitas ASN	88				Indeks profesionalitas ASN	88	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah , evaluasi pelaporan (Renstra, Renja, Perubahan renja, RKA dan DPA, evaluasi)	8	777.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah , evaluasi pelaporan (Renstra, Renja, Perubahan renja, RKA dan DPA, evaluasi)	8	777.000.000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	19	29.508.083.450	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	19	29.508.083.450
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8	148.365.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8	148.365.500

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	2.133.494.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	2.133.494.000
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan	5	965.250.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan	5	965.250.000
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	2.577.955.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	2.577.955.000
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	2.511.775.375	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	2.511.775.375

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	411.677.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	411.677.000
21103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali (kali)	12,00	8.949.468.500	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali (kali)	12,00	8.949.468.500
			Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udara	2,00				Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udara	2,00	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Luas lahan kritis yang dikonservasi/rehabilitasi (Ha)	30				Luas lahan kritis yang dikonservasi/rehabilitasi (Ha)	30	
21103101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah titik pantau kualitas air	60	6.121.968.500	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah titik pantau kualitas air	60	6.121.968.500
			Jumlah titik pantau kualitas udara	20				Jumlah titik pantau kualitas udara	20	
			Jumlah titik pantau kualitas air laut	7				Jumlah titik pantau kualitas air laut	7	

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan	10	776.250.000	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan	10	776.250.000
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	45	2.051.250.000	Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	45	2.051.250.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur yang tersusun	2	1.725.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur yang tersusun	2	1.725.000.000
2.11.02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	1	575.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	1	575.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.02.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Persentase tersusunnya dokumen KLHS Tata Ruang dan RPJMD Provinsi Jawa Timur	65	1.420.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Persentase tersusunnya dokumen KLHS Tata Ruang dan RPJMD Provinsi Jawa Timur	65	1.420.000.000
21104	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)		Jumlah Kabupaten/ Kota yang diberikan pembinaan dan pengelolaan KEHATI	12	1.840.000.000	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)		Jumlah Kabupaten/ Kota yang diberikan pembinaan dan pengelolaan KEHATI	12	1.840.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110401	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi		jumlah kegiatan action learning yang dilaksanakan dikabupaten/kota	190	3.445.000.000	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi		jumlah kegiatan action learning yang dilaksanakan dikabupaten/kota	190	3.445.000.000
21106	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Prosentase peningkatan ketaatan usaha/ kegiatan	15	920.000.000	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Prosentase peningkatan ketaatan usaha/ kegiatan	15	920.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.06.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Prosentase pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/ kegiatan	100	1.180.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Prosentase pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/ kegiatan	100	1.180.000.000
21105	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang dikelola	63,2	517.500.000	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang dikelola	63,2	517.500.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi	100				Persentase penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi	100	
21105101	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Volume Limbah B3 lintas kabupaten/ kota yang berhasil dikumpulkan oleh provinsi	55	517.500.000	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Volume Limbah B3 lintas kabupaten/ kota yang berhasil dikumpulkan oleh provinsi	55	517.500.000
21111	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Sampah yang dikelola	96,3	2.415.000.000	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Sampah yang dikelola	96,3	2.415.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST regional		Persentase Sampah padat yang dikelola	99	2.415.000.000	Penanganan Sampah di TPA/TPST regional		Persentase Sampah padat yang dikelola	99	2.415.000.000
21110	Program penanganan pengaduan Lingkungan hidup		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan"	96	632.500.000	Program penanganan pengaduan Lingkungan hidup		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan"	96	632.500.000
21110101	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan"	48	632.500.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan"	48	632.500.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211108	Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat		Persentase peserta yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup	50	750.000.000	Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat		Persentase peserta yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup	50	750.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211108.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6	1.000.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6	1.000.000.000
21109	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat		persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	7	402.500.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat		persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	7	402.500.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21109.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	136	402.500.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	136	402.500.000
21109.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	136	402.500.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	136	402.500.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21107	Program pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui"	100	517.500.000	Program pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persentase Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui"	100	517.500.000
21107.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	3	517.500.000	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	3	517.500.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022					HASL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU DEFINITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH				57.703.068.825					57.703.068.825

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus memenuhi kaidah transparansi. Penyusunan rencana pembangunan daerah secara transparan bertujuan agar perumusan rencana pembangunan daerah menjadi tepat sasaran. Penyusunan rencana pembangunan daerah secara transparan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus mampu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Oleh karena itu, dalam memenuhi kaidah transparansi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, maka perlu dilakukan inventarisasi dan analisis usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan yang terkait.

Inventarisasi dan analisis usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi, sehingga usulan yang masuk merupakan usulan kegiatan berasal dari seluruh kabupaten yang di Jawa Timur, walaupun tidak semua usulan yang masuk diakomodir untuk dijadikan kegiatan DLH provinsi Jawa Timur.

Tabel II. 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/ Kota Tahun 2022

Hasil Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2020 terhadap usulan Kab/ Kota untuk Program/ Kegiatan tahun 2021 sebagai berikut:

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Usulan Kegiatan Th. 2021
Program	Kegiatan			vol	Sat		
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Pendampingan penerapan sistem manajemen lingkungan hidup bagi masyarakat di lingkungan industri (DBHCHT)	Kabupaten Pacitan	1	paket	100.000	
	Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	pendampingan dan fasilitasi penurangan emisi karbon di lumajang	Kabupaten Lumajang	1	paket	200.000	
	Kegiatan Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengadaan Bibit Bakau	Desa penunggal kecamatan nguling kab. probolinggo	500.000	Bibit	10.000.000	100.000
		Pengadaan Tanaman Keras (Klampis dan Bangkalan)	Kab. bangkalan	500	batang	100.000.000	
		Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air dan Tanah (Pembersihan sampah/Coastal Clean Up pada 2 lokasi pesisir pantai)	Kab. Sumenep Pesisir Kecamatan Kalianget dan Kecamatan Dungkek	2	Lokasi	150.000	
		Monitoring dan Transplantasi Terumbu Karang (Rehabilitasi Terumbu Karang dan Monitoring Sebaran Terumbu Karang)	Kab. Sumenep Kecamatan Giligenting dan Kecamatan Talango	2	Lokasi	650.000	1 lokasi

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Usulan Kegiatan Th. 2021
Program	Kegiatan			vol	Sat		
	Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem(Pengembangan RTH)	Kab. Sumenep TPA Tanonggul, Kelurahan Bangselok, Kelurahan Karangduak, Kelurahan Kepanjin, Kelurahan Pajagalan dan Desa Kolor	2	Lokasi	400.000	1 lokasi
<i>Program Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</i>	Kegiatan Pelaksanaan Upaya dan Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup	Pengadaan Bor Biopori	Kabupaten Pacitan	135	unit	54.000	
		Pendampingan Sekolah Adiwiyata	Kabupaten Pacitan	3	paket	30.000	
		Pengadaan Biopori Sekolah Adiwiyata, Desa Kelurahan Berseri, Desa Kelurahan Proklam, Rehabilitasi Lahan Kritis, Program Kali Bersih, Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Website Dinas Lingkungan Hidup. Belanja bibit tanaman	Kabupaten Lumajang	1	Paket	760.000	
	Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Penataan Hukum Lingkungan	Pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	Kabupaten Pacitan	1	Paket	19.000	
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3	pendampingan dan fasilitas penurunan emisi karbon di lumajang	Kabupaten Lumajang	1	paket	200.000	

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Usulan Kegiatan Th. 2021
Program	Kegiatan			vol	Sat		
		Pengadaan Kontainer Sampah	Kabupaten Lumajang	22	Unit	1.100.000	5
		fasilitasi dan pendampingan bank sampah di KSPN BTS	Kec. Sunduro, Kab. Lumajang	2	Paket	200.000	1
		Kontainer Sampah	Kraksaan, Desa Sukapura, Desa Lumbang, Paiton	10	Unit	350.000	5 unit
		Pencacah plastik Crusher ADR PX 400 kapasitas 400- 500 kg / jam	Kab. Madiun	1	Unit	41.000	
		Mesin Press Hidrolik sampah plastik Kapasitas 300 kg/ jam Penggerak diesel 20 HP / motor listrik 10 Hp	Kab. madiun	1	Unit	55.000	
		Pemberdayaan pengelolaan sampah pasar metode BSF	Kecamatan Tuban, Kecamatan Plumpang, kecamatan Montong, Kecamatan Tambakboyo, kecamatan Palang	5	paket	80.000	
		Pengadaan Tong Komposter	Kota malang RW.05 Kelurahan Rampal Celaket	4	Unit	12.000	
		Pengadaan Tong Komposter	Kota Malang RW.05 Kelurahan Rampal Celaket	4	Unit	12.000	
Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Kegiatan Penguatan Kapasitas, Kompetensi dan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan, serta Jaringan Pemantauan dan	pelatihan ISO 17025: 2017	Kab. lumajang	1	kegiatan	100.000	

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Usulan Kegiatan Th. 2021
Program	Kegiatan			vol	Sat		
	Penyajian Data Kualitas Lingkungan						
		Bimtek Audit internal dan kaji ulang manajemen laboratorium pengujian sesuai ISO / IEC 17025 2017 dan berbasis ISO 19011 2018	Kab. Nganjuk	3	orang	27.000	1kali
		Bimtek Investigasi sumber penyebab ketidaksesuaian dalam sistem manajemen mutu Laboratorium dan tindakan perbaikannya menurut ISO / IEC 17025 2017	Kab. nganjuk	3	orang	13.500	1 kali
		Penguatan kapasitas, kompetensi dan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan serta jaringan pemantauan dan penyajian data kualitas lingkungan Impinger	Kab. tuban	1	Paket	80.000	
		Penguatan kapasitas, kompetensi dan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan serta jaringan pemantauan dan penyajian data kualitas lingkungan Oven	Kab. tuban	1	paket	70.000	
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Kegiatan Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengadaan Bibit Bakau	Desa penunggal kecamatan nguling kab. probolinggo	500.000	Bibit	10.000.000	100.000

III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Agar penetapan prioritas pembangunan daerah tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, maka perlu adanya penelaahan arah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Hasil dari pemetaan dan analisis korelasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah tercantum pada Tabel III.1 dan Tabel III.2 sebagai berikut.



Tabel III. 1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021	Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022
Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata dan investigasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengamanan sosial dan reformasi ketahanan bencana.	Mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kasehatan dan infrastruktrir di Jawa Timur

Tabel III. 2. Prioritas, dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2022

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis korelasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah tercantum pada Tabel III.1 dan Tabel III.2, maka tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur sangat terkait dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur 6, yaitu ***“Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup”***.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Dengan adanya keterkaitan tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur ke-4, maka Tujuan dan Sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Renja harus mempunyai korelasi antara:

- a. Isu-isu strategis pembangunan daerah;
- b. Prioritas Arah Kebijakan Pembangunan Nasional;

- c. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam RPJMD; dan
- d. Target kinerja Renstra PD

Adapun isu penting dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur sebagaimana disebutkan pada Sub Bab II.3, antara lain:

1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2019 sebesar 63,16 mengalami penurunan sebesar 0,48 dibandingkan dengan IKTL tahun 2018 (63,56).
2. Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebesar 83,50 sedangkan pada Tahun 2019 adalah sebesar 83,32. Kondisi menunjukkan bahwa kualitas udara pada tahun 2019 mengalami penurunan kualitas sebesar 0,40.
3. Pada tahun 2019 Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan nilai sebesar 56,13. Mengalami peningkatan sebesar 3,44, namun secara umum IKA pada tahun 2019 masih perlu ditingkatkan.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan;
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3; dan
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut berpartisipasi didalam kegiatan pelestarian lingkungan.

Maka Tujuan dan Sasaran pembangunan dalam Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3. Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Tujuan : Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup			
Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022	
		Target	Satuan
1	2	3	4
Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS) Strategis dan Udara serta kerusakan Lahan	Menurunnya Beban Pencemaran Air untuk parameter:		
	BOD	7,15	(mg/lit)
	TSS	11,07	(mg/lit)
	E – Coli	1480,370	(MPN/100ml)
	total Coli	2242,955	(MPN/100ml)

Tujuan : Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup			
Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022	
		Target	Satuan
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) parameter:		
	SO ₂	17,63	ppm
	NO ₂	8,082	ppm
	Persentase Sampah yang dikelola	96,30	%
	Persentase Limbah B3 yang dikelola	63,20	%
	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan.	40	%
	Persentase usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang – undangan lingkungan hidup (%)	17	%
	Peningkatan Luasan lahan kritis sesuai kewenangan yang direhabilitasi/ dikonservasi	7,15	ha

III.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan, serta penyelesaian isu-isu penting pembangunan daerah, maka perlu dilakukan perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Perumusan program dan kegiatan prioritas ini didasarkan melalui harmonisasi dan penyesuaian antara RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Renstra DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan RKPD Tahun 2021. Sehingga program dan kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang ditetapkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4. Program dan Kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusn/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	Surabaya	90	10.815.182.011	APBD		92	10.714.382.942
		Persentase realisasi anggaran		85				87	
		Indeks profesionalitas ASN		87				88	
1.11.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Perangkat Daerah dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan	Surabaya	8	1.609.089.176	APBD		8	1.365.327.818
1.11.01.002	Pengelolaan Admistrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan	Surabaya	19	355.500.000	APBD		19	361.000.000
1.11.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	jumlah Dokumen Ketatausahaan dan kepegawaian	Surabaya	8	8.850.592.835	APBD		8	8.988.055.124
1.11.33	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan.	Surabaya	70	12.841.630.530	APBD		75	11.068.093.404

Kode	Urusn/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Dokumen Perencanaan Kabupaten/ Kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jawa Timur	65				70	
		Jumlah Kab/kota yang Melaksanakan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Jawa timur					20	
1.11.33002	Kegiatan Inventarisasi dan Penerapan Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Jatim	Surabaya	1 dok. RPPLH Jatim Tahun 2019 - 2024	1.950.000.000	APBD		0 Dok. Laporan Midterm Review RPPLH Jatim	6.086.096.446
		Persentase Jumlah kab/ Kota yang Menyusun Dokumen RPPLH	Jawa Timur	20				25	
		Persentase Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)	Jawa Timur	60				65	

Kode	Urusn/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.33003	Penerapan Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang telah memiliki dokumen KLHS	Jawa timur	21	2.041.000.000	APBD		23	2.080.000.000
1.11.33004	Kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan hidup dan/atau pelestarian SDA	Jawa Timur	300	2.857.614.148	APBD		400	2.901.996.958
1.11.34	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase Sampah yang dikelola	Jawa Timur	96,20	3.952.662.010	APBD		96,30	4.014.052.470
		Persentase Limbah B3 yang dikelola		63,10				63,20	
1.11.34.001	Kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengolahan dan Pemrosesan Sampah	Persentase peningkatan sarana TPST dan TPS 3R	Jawa Timur	98	1.255.433.776	APBD		99	1.207.180.000
1.11.34.002	Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengelolaan Limbah B3	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah B3	Jawa Timur	28	725.660.654	APBD		29	736.931.192

Kode	Urusn/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.34.003	Kegiatan Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Jawa Timur		1.971.567.581	APBD			2.002.188.828
1.11.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terpublikasinya data hasil pemantauan kualitas air badan air tiap bulan	Surabaya	12	5.138.460.611	APBD		12	5.218.268.210
		Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udara		1				1	
		Luas lahan kritis yang dikonservasi/ rehabilitasi (Ha)		20				30	
1.11.16.001	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air	Jawa Timur	27	1.498.412.116	APBD		27	1.521.684.586
		Jumlah titik pantau kualitas udara		15				20	
1.11.16.002	Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan	Jawa Timur	8	2.097.776.962	APBD		10	2.130.358.421

Kode	Urusn/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.16.003	Kegiatan Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Luasan Lahan Kritis yang direhabilitasi/ Konservasi yang menjadi kewenangan (ha)	Jawa Timur	20	1.542.271.533	APBD		30	1.566.225.203
1.11.16.004	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri	Luasan Lahan Kritis yang direhabilitasi/ Konservasi yang menjadi kewenangan (ha)	Jawa Timur	-	-	DBHCT	Target kinerja serta pagu indikatif belum ada, dikarenakan tidak ada kepastian DBHCT bagi daerah tiap tahunnya	-	-
1.11.16.005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri yang dibangun	Jawa Timur	-	-	DBHCT	Target kinerja serta pagu indikatif belum ada, dikarenakan tidak ada kepastian DBHCT bagi daerah tiap tahunnya	-	-
1.11.35	Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi	Jawa timur	225	3.578.122.722	APBD		240	3.613.807.611

Kode	Urusn/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		110				115	
		Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Adiwiyata; Kalpataru)		94				96	
1.11.35.001	Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/ Kegiatan yang diawasi secara langsung dan tidak langsung	Jawa timur	185	855.000.000	APBD		190	860.000.000
1.11.35.002	Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Penaatan Hukum Lingkungan	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jawa Timur	91	1.005.000.000	APBD		92	1.009.000.000
1.11.35.003	Kegiatan Pelaksanaan Upaya dan Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup	Jumlah institusi dan non-institusi yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, magetan, ngawi, bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gersik, Bangkalan, Sampang, Sumnened,	193	1.744.807.611	APBD		195	1.744.807.611

Kode	Urusn/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Malang kota, Madiun Kota, Surabaya, Batu						
1.11.36	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	PAD atau Retribusi Daerah (Milyar)		1.85 M	5.150.562.216	APBD		1.90 M	5.511.920.063
		Indeks Kepuasan Masyarakat/Pelanggan (IKM) terhadap pelayanan uji kualitas lingkungan hidup		78				79	
1.11.36.001	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, serta Penguatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah dokumen	Surabaya	6	1.424.339.685	APBD		6	1.446.461.705
1.11.36.002	Kegiatan Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan, dan Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan Pelanggan Jumlah	Jumlah sampel uji kualitas lingkungan	Surabaya	3.600	626.466.714	APBD		3.600	636.196.633
1.11.36.003	Kegiatan Penguatan Kapasitas, Kompetensi dan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan, serta	Persentase pemenuhan akreditasi laboratorium ISO 17025	Surabaya	100	3.099.755.817	APBD		100	3.429.261.725

Kode	Urusn/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jaringan Pemantauan dan Penyajian Data Kualitas Lingkungan								
1.11.36.005	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri	Jumlah Pengadaan alat uji kualitas lingkungan (unit)	Surabaya	1	-	DAK		1	-

Bab 4

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Berdasarkan Tujuan, Sasaran, serta Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan, maka perlu dilakukan perumusan program dan kegiatan yang lebih spesifik untuk mendukung prioritas Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan daerah. Hasil analisis korelasi antara Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Timur dengan Program dan Kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur tahun 2021 tercantum pada Tabel IV.1 sebagai berikut.

Tabel IV. 1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	NAWA BHAKTI	KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR	KODE KEGIATAN NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	TARGET	PAGU ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4		5	6	7	8
Penyelesaian Pembangunan Pusat Pengolahan Sampah dan Limbah Industri (PPSLI) Mojokerto	Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup	111.0100.34	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	003	Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Pembangunan Prasarana Dasar sebesar 40 %	2.500.000.000	Mojokerto
Peningkatan Pengelolaan Sampah		111.0100.34	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	001	Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengolahan dan Pemrosesan Sampah	• Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah sebesar 1,6 juta	942.898.000	Jawa Timur

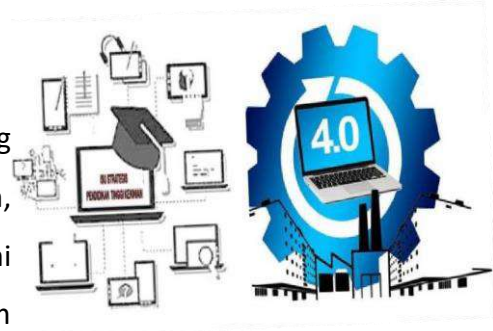
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	NAWA BHAKTI	KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR	KODE KEGIATAN NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	TARGET	PAGU ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4		5	6	7	8
						ton • Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah sebesar 4,9 juta ton		
Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		111.0100.33	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	001	Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Penurunan emisi GRK sector pengelolaan limbah sebesar 1 juta ton	644.000.000	Jawa Timur
		111.0100.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	002	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup dengan sub kegiatan: - Pembangunan IPAL Komunal Domestik - Pembangunan Infrastruktur IPAL Usaha Skala Kecil		1.000.000.000 0	Jawa Timur

Lebih lanjut, Program dan Kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang telah disusun dan tercantum pada Tabel III.4, perlu diklasifikasi berdasarkan tingkat prioritasnya. Hasil klasifikasi berdasarkan tingkat prioritas dari Program dan Kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur tahun 2021 tercantum pada Tabel IV.2 sebagai berikut.

Tabel IV. 2. Program dan Kegiatan Prioritas DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR	KODE KEGIATAN NOMENKLATUR	TARGET	PAGU ANGGARAN	LOKASI
Validasi Dokumen KLHS Kabupaten/ Kota	111.0100.33	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	002	19 Kab/ Kota	759.000.000	Kab.Banyuwangi; Kab.Blitar; Kota Blitar; Kab.Gresik; Kab. Jember; Kab.Kediri; Kota Pasuruan; Kota Surabaya; Kab.Lamongan; Malang; Kab.Mojokerto; Kab.Ngawi; Kab.Pacitan; Kab.Ponorogo; Kab.Sidoarjo; Kab.Situbondo; Kab.SumeneP; Kab.Trenggalek; Kab. Tuban
Pemantauan Kualitas Air	111.0100.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	001	1 DAS 15 Laut 19 Waduk/ Danau	920.000.000	Air Permukaan: DAS Brantas, Air Laut: Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Bangkalan, Kab. Situbondo, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Tulungagung, Kab. Pacitan, Kab. Banyuwangi, Kab. Probolinggo, Kab. Jember, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo Air Waduk/Danau: WS Bengawan Solo WS PekalenSampean WS BondoyudoBedadung WS Brantas

PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	PROGRAM NOMENKLATUR	KODE KEGIATAN NOMENKLATUR	TARGET	PAGU ANGGARAN	LOKASI
Rehabilitasi Kerusakan Lahan	111.0100.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	003	100 Ha	1.500.000.000	



Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kebutuhan dana atau pembiayaan ini agar dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup. Keberhasilan pelaksanaan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ini juga tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat secara umum.

V.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Selain itu, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah oleh DLH Provinsi Jawa Timur, maka perlu adanya sinergi dan kesinambungan antar dokumen perencanaan yang disusun terutama dalam penetapan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan. Melalui Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini, semua pihak dapat mengetahui gambaran rencana pembangunan bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan untuk:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
- b. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
- c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur; dan
- d. Penyelarasan prioritas pembangunan bidang lingkungan.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan substansi Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta target indikator kinerja dan perwujudan prioritas pembangunan daerah, maka setiap Unit Kerja DLH Provinsi Jawa Timur harus melaksanakan substansi Renja DLH Provinsi Jawa Timur dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta menjaga konsistensi substansi antara Renstra DLH

Provinsi Jawa Timur, Renja DLH Provinsi Jawa Timur, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

V.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, apabila didapati ketidaksesuaian dengan perkembangan kondisi atau keadaan di lapangan, serta asumsi, prediksi dan estimasi pencapaian target indikator kinerja dan perwujudan prioritas pembangunan daerah, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian substansi Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dalam bentuk Perubahan Renja DLH Provinsi Jawa Timur beserta dokumen-dokumen perencanaan lain yang berkaitan dengan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Surabaya, April 2021

PIH KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR



SINARTO, S.Kar, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 199103 1 007